

---

## Kajian Awal Integrasi Tata Ruang Dan Kebijakan Satu Peta Di Indonesia

**Dodi Widiyanto**

Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada

[dodi.widiyanto@ugm.ac.id](mailto:dodi.widiyanto@ugm.ac.id)

---

### Article History

accepted 05/08/2021

approved 15/08/2021

published 11/09/2021

---

### Abstrak

Implementasi kebijakan satu peta di Indonesia pada tahun 2016-2020 terdiri atas kompilasi, integrasi, berbagi data, sinkronisasi, dan regulasi. Makalah ini hanya membahas integrasi. Dasar pemilihan integrasi dikarenakan konsep ini sering dibahas di dalam kajian tata ruang. Tujuan penulisan makalah ini adalah mendiskusikan konsep integrasi khususnya topik tata ruang di dalam kebijakan satu peta di Indonesia. Metode kajian yang dipilih adalah analisis dokumen kebijakan. Dokumen kebijakan sebagai data utama makalah ini bersumber dari laporan pelaksanaan percepatan kebijakan satu peta (PKSP) tahun 2016-2020. Kerangka kerja analisis makalah ini mengadopsi tiga kategori integrasi, yaitu sektoral, teritorial, dan organisasi. Hasil dari kajian ini berupa matriks yang menjelaskan tiga kategori integrasi dengan tema-tema hasil review terhadap dokumen kebijakan. Tindak lanjut dari hasil kajian adalah agenda-agenda penelitian dengan fokus integrasi tata ruang di dalam kebijakan satu peta.

**Kata kunci:** *integrasi, tata ruang, PKSP*

---

---

## PENDAHULUAN

Kebijakan Satu Peta (KSP) menurut Darmin Nasution dalam sebuah wawancara dengan Buletin Tara Ruang, KSP diyakini akan mendukung tata ruang melalui satu referensi peta dasar yang digunakan sebagai data dasar perencanaan (Butaru, 2015). Salah satu keunggulan KSP adalah luarannya yang berupa produk satu peta (Pratikno, 2017). Melalui KSP, data dasar geospasial yang bersifat tematik atau Informasi Geospasial Tematik/IGT diharapkan dapat diintegrasikan dengan tata ruang melalui tiga kegiatan utama KSP yaitu kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi (Butaru, 2016; Pratikno, 2017).

Sue Kidd menjelaskan bahwa integrasi merupakan isu utama dalam beberapa penelitian terdahulu di bidang perencanaan (Kidd, 2007). Melalui hasil review terhadap beberapa referensi, Sue Kidd merumuskan tiga kategori integrasi, yaitu sektoral, teritorial, dan organisasional (Kidd, 2007). Pertama, secara terjemahan ringkas, merujuk dari pendapat de Boe et al. tahun 1999 Sue Kidd menjelaskan bahwa integrasi sektoral digambarkan sebagai penggabungan atau diistilahkan sebagai "*joining-up*" berbagai dokumen kebijakan dan para pelakunya di wilayah yang spesifik (Kidd, 2007, p. 164) Lebih lanjut, integrasi sektoral terdiri atas integrasi lintas sektor atau *cross sectoral* dan integrasi antar instansi atau *inter agency* (Kidd, 2007). Secara terjemahan ringkas, integrasi lintas sektoral adalah "integrasi berbagai kebijakan publik dalam satu wilayah" (Kidd, 2007, p. 167). Sedangkan definisi dari terjemahan ringkas integrasi antar instansi atau *inter agency* adalah "integrasi aktivitas-aktivitas instansi pemerintah, swasta dan lembaga sosial di satu wilayah" (Kidd, 2007, p. 167). Kedua, integrasi teritorial yang terdiri atas integrasi vertikal dan horisontal. Integrasi vertikal dari hasil terjemahan ringkasnya adalah "integrasi dari berbagai aktivitas rencana tata ruang dalam skala spasial yang berbeda" (Kidd, 2007, p. 167). Sedangkan integrasi horisontal diterjemahkan sebagai "integrasi dari aktivitas rencana tata ruang antar wilayah atau wilayah tetangganya dengan tujuan yang sama" (Kidd, 2007, p. 167). Ketiga, integrasi organisasional terdiri atas tiga macam integrasi yaitu integrasi strategis, operasional, dan pemangku kepentingan atau stakeholder atau disipliner (Kidd, 2007). Integrasi strategis dapat diterjemahkan sebagai "integrasi dari perencanaan tata ruang terhadap strategi-strategi, program-program, dan berbagai inisiasi dalam satu wilayah" (Kidd, 2007, p. 167). Sedangkan integrasi operasional adalah "integrasi rencana tata ruang dengan mekanisme yang sesuai di satu wilayah" (Kidd, 2007, p. 167). Kemudian definisi integrasi pemangku kepentingan adalah "integrasi berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder di dalam satu wilayah" (Kidd, 2007, p. 167).

Sementara itu, hasil review penulis terhadap dokumen kebijakan, yaitu Laporan Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) tahun 2016-2020 (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2020) mengidentifikasi empat tema dari strategi penguatan program kebijakan satu peta pasca 2020 di halaman 62-63. Empat tema tersebut adalah peraturan terbaru, pengelolaan data dan informasi geospasial, institusi, dan mekanisme. Dasar pemilihan tema tersebut adalah dengan mengkaji dokumen kebijakan tersebut dan juga memperhatikan fokus dari kebijakan, strategi, tujuan dari kebijakan, dan penekanan dari kebijakan (Humphrey et al., 2003).

Di Indonesia, pengalaman integrasi tata ruang dapat dilihat dari praktik integrasi tata ruang darat dan laut (Desfitriza, Hidayanti, Pahayu, & Rudianingsih, 2021). Salah satu kendala dalam pengintegrasian adalah bagaimana teknis pengintegrasian (Desfitriza et al., 2021). Sementara itu, di Indonesia dengan keberadaan dokumen perencanaan tata ruang dan perencanaan pembangunan memungkinkan adanya permasalahan integrasi, sebagai contoh dalam hal kelembagaan, sumber daya manusia sampai ke permasalahan pengintegrasian muatan dokumen perencanaan (Yulianti, 2017).

---

Makalah ini membahas bagaimana keterkaitan konsep integrasi tata ruang dalam KSP (Tabel 1). Hasil dari kajian ini adalah sebuah matriks (Elia & Margherita, 2018; Humphrey et al., 2003; Peeters et al., 2017). Metode yang digunakan adalah mengelaborasi matriks yang berisikan kategori integrasi tata ruang dan hasil identifikasi terhadap tema-tema PKSP. Kemudian penulis mencocokkan kategori dan tema-tema terpilih dengan muatan-muatan yang ada di dalam sumber data dan literatur yang tersedia (Humphrey et al., 2003; Rijanta, 2020). Di tabel 1, penulis menyingkat nama-nama kategori (beserta dengan komponen penyusunnya atau subkategori) dan tema dengan merujuk kepada bagaimana penulisan matriks TOWS (Muhammad, 2008). Terdapat dua belas (12) topik hasil perpaduan antara integrasi tata ruang dengan tema-tema PKSP. Selain itu, analisis berupa isu-isu kritis disajikan untuk setiap kelompok (semisal kelompok (S-PT) yang didetilkan dengan ILS-PT dan IAI-PT, dan seterusnya) didalam matriks menghasilkan dua belas (12) kombinasi antara kategori dan tema di Tabel 1 (Peeters et al., 2017; Saiu, 2017). Menurut (Veverka, n.d.) isu-isu kritis adalah topik-topik yang berkaitan dengan permasalahan dan solusinya. Topik dapat diperoleh dari hasil bacaan terhadap referensi dan minat dari peneliti (Peters, 2017). Isu-isu kritis tersebut kemudian dideskripsikan menurut definisi dan konteksnya (Medina-Muñoz & Medina-Muñoz, 2013; Peeters et al., 2017). Namun, di dalam makalah ini hasil utama dari kajian adalah pertanyaan-pertanyaan yang diperoleh dari hasil identifikasi terhadap isu-isu atau topik (Peters, 2017). Kemudian perpaduan dari sub-kategori seperti integrasi lintas sektoral (ILS) dengan tema-tema PKSP menghasilkan dua puluh delapan (28) sub-topik. Hasil dari kajian ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan dari subkategori dengan tema-tema. Dengan demikian, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berjumlah lebih dari dua belas pertanyaan. Sedangkan definisi, konteks, dan solusi dari setiap isu-isu kritis belum dijelaskan di dalam kajian ini. Oleh karena itu, definisi, konteks, dan solusi-solusi atau jawaban dari setiap pertanyaan merupakan peluang untuk menindaklanjuti kajian awal ini dengan penelitian-penelitian berikutnya mengenai integrasi tata ruang dengan PKSP.

Tujuan penulisan makalah ini adalah mengidentifikasi isu-isu kritis atau topik-topik mengenai kategori integrasi tata ruang dan kaitannya dengan kebijakan satu peta. Makalah ini selanjutnya disusun dalam bagian metode, hasil dan pembahasan, serta simpulan.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian *desk study* dengan fokus mereview dokumen kebijakan (Grafakos, Trigg, Landauer, Chelleri, & Dhakal, 2019). Data yang digunakan bersumber dari internet (Moschitz, 2018). Sumber data (dokumen kebijakan) yang digunakan adalah Laporan Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta tahun 2016-2020 (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2020). Untuk menganalisis data tersebut, penulis menggunakan teknik analisis dokumen kebijakan (Humphrey et al., 2003). Teknik analisis konten yang diarahkan atau *directed content analysis* dilakukan untuk menganalisis dan mereview kebijakan (Hsieh & Shannon, 2005; Whaley & Weatherhead, 2016). Dokumen kebijakan dianalisis dengan cara mengkaji kriteria integrasi tata ruang dengan tema-tema terpilih dari buku laporan PKSP (Humphrey et al., 2003; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2020; Kidd, 2007; Warsito, Budiharsana, Burns, & Hartono, 2021).

Makalah ini disusun dari hasil identifikasi terhadap kategori dan tema sebagai dasar penyusunan matriks (Humphrey et al., 2003). Dari hasil review terhadap peneliti sebelumnya, Kidd (2007) merumuskan tiga kategori ataupun dimensi integrasi yaitu sektoral, teritorial, dan organisasional. Makalah ini mengadopsi tiga kategori integrasi penataan ruang dari Sue Kidd. Sedangkan tema yang dipilih adalah peraturan terbaru,

pengelolaan data dan informasi geospasial, institusi, dan mekanisme (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2020).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian merupakan hasil perbandingan antara kategori hasil penelusuran pustaka terhadap konsep integrasi tata ruang dengan tema-tema yang diidentifikasi dari laporan PKSP tahun 2016-2020. Tiga kategori integrasi tata ruang yaitu sektoral (S), teritorial (T), dan organisasional (O). Tema-tema hasil identifikasi PKSP yaitu peraturan terbaru (PT), pengelolaan data dan informasi geospasial (PDIG), institusi (I), dan mekanisme (M). Empat tema tersebut merupakan hasil identifikasi terhadap strategi penguatan program kebijakan satu peta pasca tahun 2020 di halaman 62 dan 63 Laporan PKSP tahun 2016-2020 (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2020). Terdapat dua belas (12) topik hasil identifikasi integrasi dan tema-tema PKSP. Topik-topik tersebut adalah sebagai contoh S-PT, yaitu hasil perbandingan antara kategori integrasi sektoral (S) dengan peraturan terbaru (PT) sampai dengan O-M, yaitu integrasi organisasional (O) dengan mekanisme (M).

**Tabel 1. Matriks kategori integrasi tata ruang dan tema-tema PKSP**

Integrasi tata ruang	Tema PKSP			
	Peraturan terbaru (PT)	Pengelolaan data dan informasi geospasial (PDIG)	Institusi (I)	Mekanisme (M)
Sektoral (S)	(S-PT)	(S-PDIG)	(S-I)	(S-M)
- Integrasi Lintas Sektoral (ILS)	ILS-PT	ILS-PDIG	ILS-I	ILS-M
- Integrasi Antar Instansi (IAI)	IAI-PT	IAI-PDIG	IAI-I	IAI-M
Teritorial (T)	(T-PT)	(T-PDIG)	(T-I)	(T-M)
- Integrasi Vertikal (IV)	IV-PT	IV-PDIG	IV-I	IV-M
- Integrasi Horisontal (IH)	IH-PT	IH-PDIG	IH-I	IH-M
Organisasional (O)	(O-PT)	(O-PDIG)	(O-I)	(O-M)
- Integrasi Strategis (IS)	IS-PT	IS-PDIG	IS-I	IS-M
- Integrasi Operasional (IO)	IO-PT	IO-PDIG	IO-I	IO-M
- Integrasi Pemangku Kepentingan (IPK)	IPK-PT	IPK-PDIG	IPK-I	IPK-M

Sumber: hasil elaborasi penulis dengan membandingkan kategori dan tema di dalam Kidd (2007) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2020).

---

Pertanyaan-pertanyaan untuk topik (S-PT)

1. Apakah Peraturan Presiden terbaru yaitu Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 (Republik Indonesia, 2021) akan mampu mengakomodasi pelaksanaan KSP di suatu wilayah? (ILS-PT)
2. Bagaimana masyarakat dapat mengakses sistem geoportal PKSP? (IAI-PT)
3. Faktor-faktor apa saja yang membatasi atau memudahkan masyarakat dalam mengakses sistem geoportal PKSP? (IAI-PT)
4. Apakah semua SDM profesional di bidang IG sudah tersertifikasi? (IAI-PT)

Pertanyaan-pertanyaan untuk topik (S-PDIG)

5. Apakah lembaga-lembaga pemerintah, swasta, dan sosial dapat berpartisipasi dalam kegiatan pemetaan partisipatif dan hasilnya sesuai dengan harapan lembaga-lembaga tersebut? (ILS-PDIG)
6. Sejauh mana peran geoportal PKSP dalam mendukung aktivitas-aktivitas rencana tata ruang instansi pemerintah, swasta, dan lembaga sosial? (IAI-PDIG)
7. Apakah menu-menu yang ditampilkan dalam sistem geoportal PKSP dapat dengan mudah dioperasionalkan oleh operator semua lembaga? (IAI-PDIG)
8. Apakah hasil pengolahan dan analisis data geospasial sesuai dengan kebutuhan pengguna? (IAI-PDIG)
9. Apakah semua lembaga sudah mengetahui manfaat dari sistem geoportal PKSP? (IAI-PDIG)

Pertanyaan-pertanyaan untuk topik (S-I)

10. Apakah semua informasi geospasial sudah dapat diakses lembaga pemerintah, swasta, sosial, dan masyarakat melalui sistem geoportal PKSP? (ILS-I), (IAI-I)

Pertanyaan-pertanyaan untuk topik (S-M)

11. Apakah kebijakan atau peraturan terbaru PKSP mendukung mekanisme kegiatan usaha di suatu wilayah? (ILS-M)

Pertanyaan-pertanyaan untuk topik (T-PT)

12. Faktor-faktor apa saja yang mendukung kapasitas SDM pengelola PKSP di tingkat pusat dan daerah? (IV-PT)
13. Apa saja strategi untuk menyelesaikan permasalahan penataan ruang? (IH-PT)

Pertanyaan-pertanyaan untuk topik (T-PDIG)

14. Siapa saja konsultan yang bertugas untuk mendukung program-program PKSP? (IV-PDIG) (IS-PDIG)
15. Bagaimana kemudahan mekanisme perizinan tata ruang setelah sistem geoportal PKSP tersedia? (IO-PDIG)
16. Apakah dengan ketersediaan peta-peta tematik terbaru dengan skala besar membantu proses perencanaan tata ruang di suatu wilayah? (IV-PDIG)

Pertanyaan-pertanyaan untuk topik (T-I)

Pertanyaan-pertanyaan untuk topik (T-M)

17. Berapa persentase peta-peta tematik mendukung semua kegiatan perencanaan tata ruang di suatu wilayah dan wilayah-wilayah tetangganya? (IH-M)
18. Apakah sudah tersedia peta-peta tematik PKSP skala besar di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota? (IV-M)

Pertanyaan-pertanyaan untuk topik (O-PT)

19. Apa saja strategi, program, dan inisiasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan PKSP di masa mendatang? (IS-PT)
20. Seperti apa bentuk-bentuk insentif ataupun disinsentif untuk mendukung pelaksanaan PKSP di masa mendatang? (IO-PT)

- 
21. Bagaimana peraturan terbaru mampu mendukung mekanisme perizinan tata ruang? (IPK-PT)
  22. Bagaimana peraturan terbaru mengenai sistem teknologi informasi dapat mendukung kegiatan monitoring dan evaluasi tata ruang? (IS-PT)
- Pertanyaan-pertanyaan untuk topik (O-PDIG)
23. Bagaimana kepuasan masyarakat dalam proses perizinan kegiatan yang berkaitan dengan tata ruang? (IO-PDIG)
  24. Bagaimana kemajuan sinkronisasi terhadap peta-peta tematik terbaru dalam rangka mendukung mekanisme PKSP? (IO-PDIG)
  25. Berapa persen dari seluruh lembaga pelaksana PKSP di Indonesia yang telah beroperasi penuh dalam rangka menyelesaikan permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan? (IPK-PDIG)
- Pertanyaan-pertanyaan untuk topik (O-I)
26. Apakah informasi geospasial di sistem geoportal PKSP mampu mendukung kegiatan tata ruang? (IO-I)
  27. Apakah sudah tersedia SDM yang cakap dalam mengoperasikan sistem geoportal PKSP di suatu wilayah? (IPK-I)
- Pertanyaan-pertanyaan untuk topik (O-M)
28. Apakah proses penerbitan perizinan mengacu kepada peta tematik PKSP skala besar yang telah disusun? (IO-M)
  29. Bagaimana para pemangku kepentingan dapat mengupdate informasi geospasial secara partisipatif dan langsung? (IPK-M)

Berkaitan dengan topik seperti pemetaan partisipatif, penelitian terdahulu dari Marjuki (2018) menyimpulkan bahwa kegiatan pemetaan dengan melibatkan narasumber dari desa mampu melengkapi peta-peta konvensional. Namun, kegiatan pemetaan partisipatif memiliki keterbatasan yaitu memerlukan tindak lanjut berupa koreksi geometris sehingga nantinya memiliki kualitas yang lebih baik. Sejalan dengan hal tersebut, diharapkan melalui pertanyaan yang diajukan di nomor 29 ke depannya hasil-hasil pemetaan partisipatif yang sudah terkoreksi dapat disinkronkan terlebih dahulu sebelum nantinya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan perencanaan tata ruang.

Berkaitan dengan topik SDM tersertifikasi untuk mendukung pengelolaan Informasi Geospasial Dasar, Kusumawardhani, Sumaryono, Kusumo, Ristriantri, & Perkasa (2018) menjelaskan keterbatasan jumlah SDM profesional di bidang informasi geospasial dasar (IGD) dan faktor-faktor teknis dan non teknis yang menyebabkan mengapa kompetensi para peserta ujian sertifikasi belum tercapai. Disisi lain diharapkan di tahun-tahun mendatang kebutuhan SDM profesional IGD dapat terpenuhi sebagaimana pertanyaan nomor 4 di atas. Berkaitan dengan hal, tersebut Nurwadjedi, Rosalina, & Wibisono (2018) menyarankan perlunya kerjasama dengan perguruan tinggi.

Sementara itu, berkaitan dengan isu penataan ruang yang kemudian dikerucutkan ke dalam pembahasan seperti ketersediaan peta-peta dasar skala besar beserta dengan kualitas data menarik perhatian Nurwadjedi et al. (2018). Di dalam makalahnya, Nurwadjedi et al. juga mengupas bagaimana pentingnya integrasi tata ruang dan peran dari geoportal untuk mendukung berbagai kegiatan penataan ruang dan perizinan. Ke depan, apabila ingin mengkaji bagaimana peranan geoportal KPS, integrasi tata ruang dapat dikembangkan dari pertanyaan 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 23, 24, dan 25.

## **SIMPULAN**

Makalah ini diharapkan dapat berkontribusi dalam diskusi integrasi tata ruang dan KSP. Di Indonesia persoalan integrasi penataan ruang menjadi sangat penting

---

(Cahyani, 2021). Lebih lanjut, apabila beberapa tahun sebelumnya persoalan seperti integrasi tata ruang darat dan laut dapat dijawab dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Karya/ UUCK (Cahyani, 2021). Namun, isu-isu integrasi tata ruang seperti 1) koordinasi antar lembaga atau instansi baik di tingkat pusat sampai daerah, 2) ketersediaan sumberdaya manusia yang tersertifikasi sebagai pengelola sistem informasi geoportal KSP, 3) perbedaan muatan perencanaan spasial dan pembangunan masih akan menjadi isu-isu yang layak dikaji (Yulianti, 2017). Sehingga penelitian lanjutan seperti mengkonfirmasi topik-topik hasil kajian konten terhadap kategori integrasi tata ruang dan tema-tema KSP perlu dilakukan. Semisal, menambahkan informasi dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah melalui kegiatan wawancara dengan para ahli serta menambahkan dokumen kebijakan untuk dasar analisis (Humphrey et al., 2003). Selain itu, deskripsi terhadap isu-isu dan topik-topik integrasi penataan ruang diharapkan juga dapat dijelaskan (Medina-Muñoz & Medina-Muñoz, 2013; Peters, 2017). Kajian mendalam mengenai bagaimana peran peta dan teknologi sistem informasi geografi dalam mendukung integrasi penataan ruang dan daerah aliran sungai juga berpotensi untuk diteliti (Smith, Wall, & Blackstock, 2013).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Butaru. (2015). Profil Tokoh: Memperkuat kelembagaan penataan ruang untuk mewujudkan nawacita. In *Buletin Tataruang* (Vol. Edisi III-2015, pp. 4-7). Retrieved from <https://tataruang.atrbpn.go.id/Bulletins/Detail/93#book2/> (diakses 26 Juli 2021)
- Butaru. (2016). Peluncuran pelaksanaan kebijakan satu peta. In *Buletin Tataruang* (Vol. Edisi V-2016, pp. 30-31). Retrieved from <https://tataruang.atrbpn.go.id/Bulletins/Detail/98#book2/> (diakses 26 Juli 2021)
- Cahyani, D. T. (2021). Ruang kita setelah UUCK, Mau dibawa kemana? In *Buletin Penataan Ruang* (Vol. Edisi 1 Januari - Februari 2021, pp. 63-66). Retrieved from <https://tataruang.atrbpn.go.id/Bulletins/Detail/122#book2/> (diakses 26 Juli 2021)
- Desfitriza, Hidayanti, M. M., Pahayu, C., & Rudianingsih, M. (2021). Integrasi rencana tata ruang darat dan rencana tata ruang laut dalam tata ruang wilayah provinsi. In *Buletin Penataan Ruang* (Vol. Edisi 2 Maret-April 2021, pp. 14-18). Retrieved from <https://tataruang.atrbpn.go.id/Bulletins/Detail/123#book2/> (diakses 26 Juli 2021)
- Elia, G., & Margherita, A. (2018). Can we solve wicked problems? A conceptual framework and a collective intelligence system to support problem analysis and solution design for complex social issues. *Technological Forecasting and Social Change*, 133, 279-286. doi:<https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.03.010>
- Grafakos, S., Trigg, K., Landauer, M., Chelleri, L., & Dhakal, S. (2019). Analytical framework to evaluate the level of integration of climate adaptation and mitigation in cities. *Climatic Change*, 154, 87-106.
- Hsieh, H.-F., & Shannon, S. E. (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis. *Qualitative Health Research*, 15(9), 1277-1288. doi:10.1177/1049732305276687
- Humphrey, C., Ehrich, K., Kelly, B., Sandall, J., Redfern, S., Morgan, M., & Guest, D. (2003). Human resources policies and continuity of care. *Journal of Health Organization and Management*, 17(2), 102-121. doi:10.1108/14777260310476159

- 
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2020). *Laporan Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) Tahun 2016-2020*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta.
- Kidd, S. (2007). Towards a Framework of Integration in Spatial Planning: An Exploration from a Health Perspective. *Planning Theory & Practice*, 8(2), 161-181. doi:10.1080/14649350701324367
- Kusumawardhani, A. D., Sumaryono, Kusumo, D. A., Ristriantri, Y. R. A., & Perkasa, Y. H. (2018). *Evaluasi sertifikasi tenaga profesional bidang informasi geospasial dalam penyelenggaraan informasi geospasi dasar untuk mendukung kebijakan satu peta (Evaluation of professional power certification in geospatial information in the implementation of basic geospatial information to support one map policy)*. Paper presented at the Seminar Nasional Geomatika 2018 "Penggunaan dan Pengembangan Produk Informasi Geospasial Mendukung Daya Saing Nasional", IPB International Convention Center 5 September 2018. <http://semnas.big.go.id/index.php/SN/article/view/931> (diakses 12 Juli 2021)
- Marjuki, B. (2018). *Penerapan teknik pemetaan partisipatif untuk mendukung penyusunan basis data spasial penggunaan lahan dan sumberdaya desa (Studi kasus Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta) (Application of participatory mapping techniques to support the development of village land-use and resources spatial database Case study of Sendangadi Village, Mlati District, Sleman Regency, Yogyakarta Special Area)*. Paper presented at the Seminar Nasional Geomatika 2018 "Penggunaan dan Pengembangan Produk Informasi Geospasial Mendukung Daya Saing Nasional", IPB International Convention Center 5 September 2018. <http://semnas.big.go.id/index.php/SN/article/view/929> (diakses 7 Juli 2021)
- Medina-Muñoz, D. R., & Medina-Muñoz, R. D. (2013). Critical issues in health and wellness tourism: an exploratory study of visitors to wellness centres on Gran Canaria. *Current Issues in Tourism*, 16(5), 415-435. doi:10.1080/13683500.2012.748719
- Moschitz, H. (2018). Where is urban food policy in Switzerland? A frame analysis. *International Planning Studies*, 23(2), 180-194. doi:10.1080/13563475.2017.1389644
- Muhammad, S. (2008). *Matriks dan skenario dalam strategi*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Nurwadjadi, Rosalina, L., & Wibisono, Y. (2018). *Membangun satu peta untuk penataan ruang (Developing one map for spatial planning)*. Paper presented at the Seminar Nasional Geomatika 2018 "Penggunaan dan Pengembangan Produk Informasi Geospasial Mendukung Daya Saing Nasional", IPB International Convention Center 5 September 2018. <http://semnas.big.go.id/index.php/SN/article/view/946> (diakses 12 Juli 2021)
- Peeters, E., Nelissen, J., De Cuyper, N., Forrier, A., Verbruggen, M., & De Witte, H. (2017). Employability Capital: A Conceptual Framework Tested Through Expert Analysis. *Journal of Career Development*, 46(2), 79-93. doi:10.1177/0894845317731865
- Peters, K. (2017). *Your human geography dissertation: Designing, doing, delivering*. London: SAGE.
- Pratikno, H. (2017). Hasil integrasi peta rencana tata ruang di Pulau Kalimantan (RTR KSN Perbatasan Negara di Kalimantan, RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota) dalam rangka mendukung kebijakan satu peta. In *Buletin Tata Ruang* (Vol. Edisi VI-2017, pp. 41- 52). Retrieved from <https://tataruang.atrbpn.go.id/Bulletins/Detail/108#book2/> (diakses 26 Juli 2021)



- 
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92 C.F.R. (2021).
- Rijanta, R. (2020). Konsekuensi sosio-spasial, dampak produksi pertanian dan solidaritas masyarakat menghadapi pandemi covid-19. In R. Rijanta & M. Baiquni (Eds.), *Rembug pagebluk: Dampak, respons dan konsekuensi pandemi covid-19 dalam dinamika wilayah* (pp. 148-186). Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- Saiu, V. (2017). The Three Pitfalls of Sustainable City: A Conceptual Framework for Evaluating the Theory-Practice Gap. *Sustainability*, 9(12). doi:10.3390/su9122311
- Smith, H. M., Wall, G., & Blackstock, K. L. (2013). The role of map-based environmental information in supporting integration between river basin planning and spatial planning. *Environmental Science & Policy*, 30, 81-89. doi:<https://doi.org/10.1016/j.envsci.2012.07.018>
- Veverka, J. A. (n.d.). Guidelines for interpreting critical issues. Retrieved from [http://portal.uni-freiburg.de/interpreteurope/service/publications/recommended-publications/veverka-interpeting\\_critical\\_issues.pdf](http://portal.uni-freiburg.de/interpreteurope/service/publications/recommended-publications/veverka-interpeting_critical_issues.pdf) (diakses 4 Agustus 2021)
- Warsito, G. M., Budiharsana, M. P., Burns, S., & Hartono, B. (2021). Hazed targets of the silver bullets: Transformation of disaster risk reduction policy into measurable actions in Indonesia development agenda. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 54, 102029. doi:<https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.102029>
- Whaley, L., & Weatherhead, E. (2016). Managing water through change and uncertainty: comparing lessons from the adaptive co-management literature to recent policy developments in England. *Journal of Environmental Planning and Management*, 59(10), 1775-1794. doi:10.1080/09640568.2015.1090959
- Yulianti, S. (2017). Pedoman sinkronisasi rencana tata ruang dan rencana pembangunan (Hasil kajian penyusunan materi teknis-Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2015). In *Buletin Tata Ruang* (Vol. Edisi IV-2017, pp. 39-47). Retrieved from <https://tataruang.atrbpn.go.id/Bulletins/Detail/103#book2/> (diakses 26 Juli 2021)